**PERJANJIAN TENTANG**

**PELAKSANAAN REKOGNISI PENELITIAN KOLABORATIF DOSEN-MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**

**UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOMOR ……… /Un.03/FITK/KS.01.7/06/2022**

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun 2022 antara:

1. Lilis Hidayati, SE., MM. Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, berkedudukan di Jalan Gajayana 50 Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. …………………………… Penerima Anggaran Rekognisi Penelitian Kolaboratif Dosen- Mahasiswa FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2022, berkedudukan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Rekognisi Penelitian Kolaboratif Dosen – Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang selanjutnya disebut FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2022, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENDAHULUAN

1. Anggaran Rekognisi Penelitian Kolaboratif Dosen – Mahasiswa FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah anggaran berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022.
2. Buku Pedoman Petunjuk Teknis Penelitian BOPTN Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian anggaran untuk menjamin penyaluran anggaran tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
3. Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
4. Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Anggaran meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah anggaran yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima anggaran untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
2. Melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melakukan pengawasan pelaksanaan Anggaran; dan
4. meminta laporan pertanggungjawaban;
5. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
6. Menerima dana Anggaran sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) melalui Surat Keputusan (SK) Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-2916/Un.3/FITK/PP.00.9/6/2022 tanggal 17 Juni 2022;
7. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* anggaran sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan sesuai uraian pada Petunjuk Teknis; dan
8. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran anggaran yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
9. Jumlah Anggaran yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penyaluran Anggaran dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Anggaran Melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. PIHAK KEDUA wajib menggunakan anggaran sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
12. PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan anggaran, bukti penggunaan anggaran, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan anggaran merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Ketentuan Sanksi:
14. apabila di kemudian hari, atas penggunaan anggaran mengakibatkan kerugian negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan anggaran oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
16. PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Anggaran dialokasikan dalam DIPA Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2022 nomor : DIPA-025.04.2.423812/2022 tanggal 17 November 2021

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Yang termasuk force majeure adalah:
3. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
4. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
5. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
6. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
7. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari force majeure akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
3. Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

Penerima Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen

Materai Rp.10.000.-/ 2 Materi Rp.6.000,-

…………………………. Lilis Hidayati, SE., MM